MENGUNGKAP KESIAPAN UMKM DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (PSAK-ETAP) UNTUK MENINGKATKAN AKSES MODAL PERBANKAN

I MADE NARSA, AGUS WIDODO dan SIGIT KURNIANTO
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRAK

Fakta yang ada, kendala utama yang dihadapi pihak UMKM selain modal adalah penerapan manajemen yang profesional. Mereka kurang memahami dan perlu dibekali tentang pentingnya laporan keuangan suatu bisnis. Sistem pembukuan UMKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upayanya pengembangan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) untuk UMKM yang dinamakan dengan SAK- ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang resmi diberlakukan efektif 1 Januari 2011.

Penelitian ini di dedikasikan untuk memahami secara mendalam tentang kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP. Titik berat yang dituju adalah sampai sejauhmana UMKM memahami kegunaan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang baku. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan alternatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *in-depth interview.*

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala UMKM adalah tidak memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar SAK-ETAP dan UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih muda dari beberapa UMKM yang lainnya. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi, bahkan omzet pada tahun 2010 mencapai lebih dari 800 juta rupiah, dengan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah.

Kata kunci : *Akuntansi keuangan, SAK-ETAP, UMKM*

ABSTRACT

Facts, the main obstacle faced by the SMEs in addition to capital are the application of professional management. They do not understand and need to be equipped on the importance of the financial statements of a business. Accounting system for SMEs is generally very simple and tend to ignore the rules of the financial administration of the standard (default). Though accurate financial statements and the standard will help them in their business development efforts to quantitatively and qualitatively. Therefore the Indonesian Institute of Accountants has prepared GAAP (Accounting Standards) for SMEs called the SAK-ETAP (Entities Without Public Accountability) were officially enacted effective January 1, 2011.

This study is dedicated to in-depth understanding about the readiness of SMEs in implementing SAK ETAP. The focus of the destination is to the extent SMEs understand the usefulness of financial statements prepared by financial accounting standards. In this research used a qualitative approach or an alternative approach. The method used in this study is in-depth interviews.

The results of this study found that SMEs constraint is not having the financial statements in accordance with GAAP standards-ETAP and SMEs that have a good financial record has a more rapid development than other SMEs similar stance despite age, even younger than some of the other SMEs. One of the encouraging progress of SMEs is the ability to access credit from the banks, so that the problem can be resolved any capital, even turnover in 2010 reached more than 800 million dollars, with net profit of operating expenses and other costs reached more than 100 million dollars.

Keywords: *Financial Accounting, SAK-ETAP, MSME*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah besar. Ini terbukti ketika Indonesia dilanda krisis beberapa tahun yang lalu. Usaha besar yang dibangga-banggakan malah tidak mampu bertahan diterpa krisis. Sebaliknya usaha mikro kecil dan koperasi yang selama ini dipandang sebelah mata mampu bertahan, bahkan berkembang. Ternyata, meskipun selama ini praktek layanan publik dirasakan usaha mikro dan kecil tidak terlalu adil pada mereka, namun mereka mampu menunjukan kelenturannya, usaha kecil tetap bisa berjalan dalam segala keterbatasan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi negara. Hal ini dapat dicermati dari keunggulan UMKM, yakni: (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisni lainnya, (c) memiliki diversiasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikasi dalam ekspor dan perdagangan.

Secara keseluruhan UMKM mampu menyumbang lebih dari 50% PDB (didominasi sektor perdagangan dan pertanian) serta 10% dari total ekspor (Media Akuntansi, 2007:6). Menurut data dari biro pusat statistik (BPS) UMKM di Indonesia lebih terkon-sentrasi pada industri mikro (jumlah pekerja maksimal 4 orang) sehingga 90,85%, sedangkan usaha kecil (jumlah pekerja 5 sampai dengan 19 orang) sebanyak 8,32%, dan selebihnya adalah usaha menengah (jumlah pekerja diatas 20 orang).

Pengembangan UMKM merupakan salah satu langkah strategis untuk memerangi kemiskinan dan ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi. Disamping keunggulan-keunggulan yang melekat pada UMKM, iapun memiliki beberapa kendala yang sangat klasik, seperti kesulitan dalam akses modal sehingga sulit berkembang, kesulitaan akses pemasaran, pemahaman managerial yang rendah. Kendala-kendala inilah yang harus secara simultan ditangani.

Perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah para pihak yang memiliki sumber dana. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada UMKM membuat mereka begitu "asing" terhadap sektor keuangan formal. Dampaknya, UMKM pada umumnya terjebak pada sumber-sumber dana informal, yang lebih sering membuat penderitaan yang berkepanjangan pada UMKM. Jika hal ini terus terjadi, maka potensi yang demikian menjanjikan pada bisnis UMKM akan melayang.

Upaya membantu dan mendorong UMKM terus menerus dilakukan pemerintah (dan perbankan). Dewasa ini Kementerian UMKM menyediakan bantuan permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bentuk keseriusan pemerintah ini patut dipuji. Hanya saja pengembangan sistem manajerial UMKM masih belum banyak disentuh oleh pemangku kepentingan.

Fakta yang ada, kendala utama yang dihadapi pihak UMKM selain modal adalah penerapan manajemen yang profesional. Mereka kurang memahami dan perlu dibekali tentang pentingnya laporan keuangan suatu bisnis. Sistem pembukuan UMKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung meng-abaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upayanya pengembangan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) untuk UMKM yang dinamakan dengan SAK- ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang resmi diberlakukan efektif 1 Januari 2011.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan abstrak penelitian yang telah diuraikan pada paparan sebelumnya, maka rumasan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akuntansi keuangan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
2. Bagaimana pemahaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap implementasi Standar Akuntasi Keuangan- Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)?
3. Bagaimana model implementasi SAK-ETAP pada usaha mikro dan menengah UMKM), yang sesuai?

KERANGKA TEORITIK

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kementrian Koperasi dan UMKM

Kementrian Koperasi dan UMKM menggolongkan UMKM sebagai berikut:

a. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki omset kurang dari Rp. 1 milyar pertahun.
b. Untuk Usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp. 1 milyar sampai Rp. 50 milyar pertahun.

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel:
Klasifikasi Usaha menurut Jumlah Tenaga Kerja

No.	Kategori	Jumlah tenaga kerja
1.	Usaha Rumah Tangga (Mikro)	$\leq$ 4 orang
2.	Usaha Kecil	5 – 19 orang
3.	Usaha Menengah	20 – 50 orang
4.	Usaha Besar	$\leq$ 100 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP)

Pada bulan April 2009, Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara resmi mengakui 3 (tiga) pilar standar akuntansi keuanga (IAI, 2009). Tiga pilar tersebut adalah:

1. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
2. PSAK – ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
3. PSAK – Syari'ah

Pada 1 Januari 2011, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabiltas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, dan
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah a. pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha; b. kreditur; dan c. lembaga pemeringkat kredit.

Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika :

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal;
b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM.

Penerbitanan PSAK ETAP oleh DSAK IAI ini adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Setiap entitas diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum, atau PSAK ETAP. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik , maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat memilih menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum.

Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, pada 1 Januari 2011 nanti suatu entitas tanpa akuntabilitas publik, dapat memilih untuk menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik pada menetapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan PSAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke PSAK ETAP itu, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategik bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai.

Sebagaimana diketahui, saat ini PSAK yang diterapkan oleh setiap entitas penyaji laporan keuangan adalah PSAK Umum. PSAK Umum tersebut secara bertahap oleh DSAK IAI sedang dilakukan perubahan dengan adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga pada tahun 2012 seluruh PSAK merupakan hasil adopsi dari IFRS. Oleh karena itu, pada entitas tanpa akuntabilitas publik yang saat ini menerapkan PSAK Umum dan bermaksud nantinya akan menerapkan PSAK ETAP, pada tahun 2011 harus melakukan perubahan kebijakan akuntansinya. Sedangkan bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik tidak perlu melakukan penyesuaian apapun, karena entitas ini hanya melanjutkan saja, hingga akhirnya nanti pada tahun 2012 menerapakan PSAK Umum yang sudah terkonvergensi dengan IFRS.

Karena aktivitas penyesuaian hanya perlu dilakukan oleh Entitas yang akan menerapkan PSAK ETAP, maka terhadap entitas tanpa akuntabiltas publik saat ini adalah waktu yang penting untuk mulai melakukan pertimbangan apakah akan menerapkan PSAK ETAP atau melanjutkan PSAK Umum. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena 1) Penerapan suatu PSAK menyangkut isu strategik, dan 2) Sekali entitas menetapkan menggunakan PSAK Umum maka tidak ada kesempatan lagi untuk merivisi ke PSAK ETAP.

Penentuan kebijakan PSAK dikatakan menyangkut isu strategik karena menyangkut isu yang berdampak jangka panjang disatu sisi, dan mempengaruhi arah perusahaan di masa depan. Perusahaan yang saat ini merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, umumnya perusahaan kecil-menengah (UMKM), tidak memiliki eksposure ke pengguna eksternal tentu akan lebih sederhana menggunakan PSAK ETAP. Namun demikian, jika ke depan perusahaan itu sudah memiliki rencana-rencana untuk menjadi perusahaan menengah-besar, ada eksposure pengguna eksternal, membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan, atau bahkan melibatkan pihak international dan sebagainya, maka boleh jadi entitas tersebut perrlu mempertimbangkan untuk tetap menggunakan PSAK Umum. Walaupun PSAK Umum lebih rumit dibandingkan dengan PSAK ETAP, namun jika selama ini entitas tersebut sudah menggunakan PSAK Umum maka tentu tidak terlalu asing dengan PSAK tersebut.

Persiapan yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian ke arah PSAK PSAK baru yang akhir-akhir ini terus menerus diterbitkan DSAK IAI sejalan dengan adopsi IFRS. Sebaliknya, jika entitas tanpa akuntabilitas publik ini belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangan, tidak ada eksposure ke pengguna eksternal atas laporan keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan PSAK Umum, atau setidak-tidaknya dapat menunda keputusan penggunaan PSAK Umum hingga pada saatnya nanti memandang PSAK Umum tersebut perlu diterapkan. Dalam hal demikian, entitas tersebut harus sudah memutuskan bahwa selambat-lambatnya tahun 2011 akan menerapkan PSAK ETAP.

Bagi perusahaan yang akan menerapkan PSAK ETAP di tahun 2011, persiapan penyesuain laporan keuangan ke PSAK ETAP perlu dilakukan sejak tahun 2010. Pada catatan laporan keuangan tahun 2010 perlu mengungkapkan PSAK ETAP yang akan diterapkan pada tahun 2011, serta dampaknya pada laporan keuangan 2010 seandainya pada laporan keuangan diterapkan PSAK ETAP. Kemudian, pada awal tahun 2011 sudah perlu dilakukan beberapa koreksi penyesuaian sebagai dampak atas beberapa PSAK umum yang ditiadakan dalam PSAK ETAP, seperti peniadaan pajak tangguhan, kapitalisasi biaya pinjaman, dan lain-lain. Pada penyajian laporan keuangan komparatif tahun 2011, laporan keuangan tahun sebelumnya memerlukan penyajian kembali (restatement).

METODOLOGI

Penelitian ini di dedikasikan untuk memahami secara mendalam (utuh) tentang kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP. Titik berat yang dituju adalah sampai sejauhmana UMKM memahami kegunaan laporan keuangan yang disusun berdasarkan strandar akuntansi keuangan yang baku. Hasil penelitian ini, akan sangat bermanfaat dalam menyusun sebuah model. Baik model implementasi SAK ETAP yang mudah dipahami maupun model pengabdian perguruan tinggi pada masyarakat terutama UMKM. Penelitian ini di dorong oleh tingkat kepentingan yang lebih luas, bagi perekonomian negara secara umum. UMKM, berkali-kali, terbukti tangguh dalam menghadapai krisis keuangan. Tujuan ini penelitian menggiring pada pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam

penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan alternatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview.

HASIL DAN ANALISIS

A. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Pengelola sangat memahami pentingnya catatan keuangan menurut standar akuntansi. Karena itu untuk menjamin kepercayaan terhadap laporan keuangan, pemilik merekrut seorang staf akunting. Bagi pemilik, yang harus dilaporkan adalah semua transaksi, stok/persediaan, laporan laba (rugi), serta laporan nilai dan penyusutan aset tetap. Hal ini penting karena untuk melihat apakah usaha yang sedang dijalankan sehat atau tidak. Menurut pemilik, lengkapnya laporan keuangan juga berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga perbankan. Karena selama ini modal usaha juga memanfaatkan kredit perbankan, maka untuk tetap menjaga kepercayaan lembaga perbankan, suatu usaha harus menunjukkan sebuah laporan keuangan yang sehat.

Selain untuk pihak eksternal, laporan keuangan juga berguna bagi pelaku usaha untuk memutuskan strategi yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. CV Sawoong sendiri, menurut pemilik usaha, baru menyadari hal ini sekitar akhir tahun 2008, seiring perkembangan usaha, akan semakin sulit mengontrol keuangan jika tidak disusun dalam laporan yang standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kendala

1. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan

   Seperti yang telah diutarakan pada bab sebelumnya bahwa sebagian besar para pelaku UMKM memahami bahwa pencatatan keuangan usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena itu, seperti kasus yang terjadi pada MixMax Shop, tidak ada catatan sama sekali berapa uang yang dipakai sebagai modal, untuk operasional, dll. Bahkan pencatatan transaksi akan dibuang manakala di rasa proses transaksi sudah selesai dan pembayaran dari pelanggan sudah dilakukan.

   Apa yang terjadi pada MixMax Shop terjadi juga pada CV Resureksi, bahwa meskipun usaha telah mempunyai akte pendirian CV, pengelolaan keuangan sama sekali tidak diperhatikan. Pada CV resureksi, semua nota penjualan disimpan, namun tujuan penyimpanan hanya untuk melihat apakah penjualan dengan cara kredit (bayar dibelakang) sudah dibayar oleh customer ataukah belum, karena begitu pembayaran telah diterima, segera catatan penjualan akan dibuang karena dirasa sudah tidak perlu.

   > *"……kalau melihat keadaan yang sekarang ini, dimana pekerjanya adalah aku sendiri dan Piping (suaminya), belum terlalu membutuhkan pencatatan laporan keuangan yang tertib…"* (Eva – CV Resureksi).

   > *"...Tidak ada, semua tak rekam disini (*sambil menunjuk kepalanya sendiri*).Tidak ada catatan cashflow, sebenarnya pengen bikin seperti itu tapi susah menjalaninya.."* (Syani – Mix Max Shop).

   Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada usaha Sahabat Jaya Katering, Pengelola (pemilik) mengakui pencatatan transaksi harian tidak pernah dilakukan secara teratur, yang dilakukan hanya sebatas pencatatan jenis dan banyaknya bahan yang harus dibelanjakan dari setiap pesanan yang akan dikerja-kan, setiap selesai acara maka catatan-catatan tersebut akan dibuang. Pemilik beralasan karena tidak ada orang yang fokus untuk mengurusi hal-hal yang menyangkut laporan keuangan, serta usaha yang dijalani dirasa bisa jalan tanpa harus membuat catatan keuangan yang tertib. Karena merasa bahwa tidak perlu dilakukan pencatatan keuangan secara tertib, maka yang terjadi kemudia pelaku UMKM tidak mengetahui berapa uang yang telah dipakai untuk belanja modal dan belanja pribadi.

   Ketiadaan laporan keuangan pada UMKM umumnya dimulai pada keengganan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Pencatatan transaksi merupakan kegiatan mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Sudah seharusnya semua transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian, penjualan, piutang, dan utang dicatat dengan tertib. Selain transaksi usaha, pelaku UMKM juga sudah seharusnya menginventarisir kekayaan/asetnya, baik aset lancar maupun aset tetap. Mencatat setiap transaksi sangat penting sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan. Tanpa adanya pencatatan transaksi, maka tidak

mungkin laporan keuangan dapat dibuat, setiap transaksi juga harus disertai bukti transaksi, sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar terjadi. Hal ini juga terjadi misalnya pada usaha katering Sahabat Jaya, bahwa pengelola mengaku terlalu sibuk untuk dapat mencatat setiap transaksi, karena itu ketika sudah menerima pembayaran dari pelanggan, semua bukti transaksi di rasa tidak diperlukan lagi.

Ada juga UKM yang mempunyai catatan transaksi harian dengan tertib, namun hanya berhenti pada pencatatan transaksi operasional saja. Tidak ada pencatatan nilai aset maupun modal. Sehingga apa yang menurutnya menjadi laporan keuangan adalah rekapitulasi debet dan kredit yang di susun setiap periode tertentu (dalam hal ini setiap bulan). Rekapitulasi tersebut mencakup berapa uang yang terpakai untuk operasional serta berapa uang yang masuk dari transaksi penjualan.

Pencatatan transaksi harian yang tertib misalnya yang dilakukan oleh Cedric Footwear. Pencatatan transaksi harian, baik penjualan maupun pengeluaran biaya operasional, selalu dicatat dengan tertib oleh pengelola. Sehingga dapat diketahui biaya operasional dan penjualan yang diperoleh. Catatan-catatan tersebut kemudian disalin kedalam komputer setiap seminggu sekali. Untuk pesanan sudah dibayar oleh pelanggan, maka pembayaran tersebut akan dicatat dalam laporan pemasukan. Hal yang sama juga dapat ditemui pada Gardhoe Jamur pak Agung, pemilik menyatakan bahwa selalu ada catatan transaksi harian yang berisi tentang berapa kilogram jamur yang laku terjual. Transaksi harian ini dilakukan rutin secara periodik dan berkala sesuai dengan jumlah transaksi penjualan terjadi. Pencatatan transaksi yang digunakannya masih manual, yaitu ia tulis di buku tulis biasa yang sudah ia bagi menjadi tabel untuk diisi setiap kolomnya menurut ujumlah transaksi.

Pada Cedric Footwear maupun Gerdhoe Jamur pencatatan laporan keuangan hanya berhenti pada pencatatan transaksi harian saja. Dengan demikian, usaha akan dianggap untung jika pemasukan lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Namun demikian, untuk catatan keuangan, hanya tersedia catatan arus kas untuk order saja.

Keadaan pada Cedric Footwear maupun Gerdhoe Jamur hampirmirip pada yang terjadi pada Asia Holiday Travel. Di Asia Holiday Travel, catatan uang masuk dan keluar untuk transaksi penjualan tiket pesawat dan voucher hotel tersebut tebagi menjadi empat mata uang yaitu Rupiah Indonesia (IDR), Ringgit Malaysia (MYR), Dollar Singapura (SGD), serta Dollar Amerika (USD). Pencatatan transaksi harian ini dilakukan rutin setiap hari, dari pukul 5 sore hingga pukul 7 malam. Jika ada pemesanan tiket yang dilakukan melebihi jam 7 maka akan dihitung sebagai transaksi harian untuk esok harinya. Dalam istilah pengelola (owner), catatan penjualan tersebut disebut sebagai cash flow order. Cash flow order merupakan laporan mengenai jumlah order atau pesanan tiket atau jasa travel yang masuk pada setiap harinya, setelah cash flow order tersebut dibukukan, maka akan disusun laporan nominal dari pemesanan order. Laporan nominal ini disusun biasanya 2-3 hari sekali. Laporan nominal ini disusun untuk mengetahui kesesuaian antara saldo dengan jumlah order yang diterima. Namun demikian, untuk catatan cash flow order dalam rupiah, tercatat juga pengeluaran operasional lain misalnya bayar denda PLN, uang keluar untuk sumbangan, dan lain-lain.

Persepsi bahwa pencatatan setiap transaksi dan aset itu bukan hal yang penting dalam kelangsungan usaha menyebabkan para pelaku UMKM tidak dapat menyusun laporan keuangan yang standar. Secara umum dapat diuraikan kebanyakan persepsi pelaku UMKM terhadap standar laporan keuangan adalah:

- Pelaku UMKM tidak menganggap bahwa pencatatan transaksi keuangan dan aset tidak berhubungan dengan kelangsungan usaha
- Pencatatan transaksi dan aset (sebagai bahan laporan keuangan) justru menjadi beban dan dengan demikian meningkatkan biaya jika dikerjakan.
- Laba atau rugi cukup dilihat antara selisih biaya operasional dan uang masuk.
- Ada pelaku UMKM yang beranggapan bahwa tidak perlu memonitor dan perkembangan usaha karena hasil dari usaha adalah untuk kebutuhan pribadi sehari-hari, asal pemasukan lebih besar dari belanja sudah cukup.

2. Keuangan Pribadi VS Keuangan Usaha

Dari persepsi diatas pada akhirnya akan memunculkan tidak adanya perbedaan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Hal ini yang kemudian mempersulit, dan hampir tidak mungkin menelusuri dan membedakan mana transaksi pengeluaran untuk keperluan pribadi

dan mana transaksi untuk keperluan usaha. Untuk dapat mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan, pertama-tama harus dipisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha untuk keteraturan karena pembukuan keuangan yang terpisah akan tercatat dengan jelas dan benar mana komponen usaha, dan mana komoponen pribadi.

Memisahkan keuangan usaha dan pribadi membutuhkan kedisiplinan dan konsistensi. Akibat tidak terpisahnya keuangan pribadi dan usaha berakibat pada perhitungan keuntungan atau kerugian pada akhir periode nilainya tidak bisa riil karena sudah terpotong berbagai pengambilan pribadi yang bisa jadi belum tercatat. Selain itu alokasi anggaran untuk operasional usaha menjadi kacau karena tiap periode tidak ada biaya yang sifatnya tetap, hal ini tentu akan menganggu operasional usaha misalnya kekurangan dana untuk belanja bahan baku, dll. Jika keuangan pribadi dan usaha terpisah, maka secara pembukuan semua pengeluaran mempunyai kategori yang jelas serta tidak dapat diambil begitu saja untuk pribadi karena sudah teralokasi sejak awal. Hal inilah yang mendukung penggunaan dana lebih efektif dan efisien. Pada perusahaan kecil milik keluarga, biasanya banyak anggota keluarga yang mempunyai hak mengambil uang dari kas, selain itu beberapa pemilik usaha enggan melakukan pemisahan dan pencatatan karena minalai terlalu repot atau tidak tahu caranya. Banyak yang menganggap jika usahanya masih kecil tidak memerlukan pemisahan keuangan, Padahal hal ini adalah kesalahan utama yang bisa mengganggu arus kas usaha.

Akibat tidak memisahkan keuangan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan usaha, beberapa UKM yang menjadi informan dalam penelitian ini tida mengalami kemajuan yang berarti, meskipun sudah berdiri lebih dari satu tahun. Sebut saja misalnya yang terjadi pada Resureksi, Sahabat Jaya Katering, serta MixMax Shop, dua jenis usaha dengan omzet perbulan mencapai lebih dari 10 juta rupiah per bulan, namun tidak ada hasil yang nampak untuk pengembangan usaha, pemilik tetap bersusah payah mengerjakan semuanya sendiri dan dari mulai mendirikan usaha hingga saat ini tidak ada perkembangan yang berarti pada usaha yang dijalankan, baik dari sisi aset maupun modal.

Ketidakterpisahan antara keuangan pribadi dan usaha merupakan salah satu kelemahan mendasar yang disebabkan tidak disiplin dalam membedakan dana pribadi dengan dana usaha. Hasilnya, catatan keuangan usaha menjadi kacau. Kelemahan tersebut biasanya merupakan "penyakit" utama UKM. Uang pribadi sering disamakan dengan uang modal usaha. Padahal untuk menunjukkan kualitas suatu usaha, sang pemilik usaha harus tertib dan disiplin mencatat laporan keuangannya dengan memisahkan dana usaha dari penggunaan pribadi. Jika pemisahan itu tidak dilakukan, neraca perusahaan tersebut tidak bisa mencerminkan kondisi sebenarnya karena aset pribadi bercampur dengan usaha.

Jika dilihat dari sisi perkembangan usaha, UKM yang telah secara tertib dan disiplin memisahkan dana pribadi dan usaha terlihat jauh berbeda perkembangannya. Apa yang terjadi pada CV Sawoong misalnya, dimulai dari mencatat semua transaksi dengan tertib, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, CV Sawoong dapat menganalisa keadaan keuangannya sendiri. Mengetahui posisi keuangannya yang meningkat setiap periode. Aset dan modal CV Sawoong meningkat setiap peiode sehingga kini pengelola usaha telah mengupayakan membuka jenis usaha baru dengan bidang yang mendukung usaha pertama. Jika pada awalnya Sawoong hanya menjual produk yang dibeli dari pihak lain, kini sudah merintis untuk membuka usaha produksi kaos dan asesoris, selain untuk memenuhi kebutuhan Sawoong Outlet, juga untuk memenuhi pesanan khusus beberapa pelanggan. Selain itu, dengan laporan keuangan yang real dan dapat dipertanggungjawabkan, CV Sawoong telah meraih kepercayaan beberapa bank untuk menyalurkan kredit, dengan demikian masalah modal teratasi.

Dalam kasus CV Sawoong, karena keuangan usaha selalu secara disiplin dipisahkan dari keuangan pribadi, modal usaha senantiasa meningkat seiring keuntungan yang meningkat pula. Dengan modal yang terus meningkat, area pemasaran dapat terus diperluas, strategi promosi terus diperbaiki. Kini CV Sawoong telah mempekerjakan 14 orang karyawan, mempunyai rumah produksi sendiri yang sedang dalam proses untuk menjadi unit usaha yang terpisah.

Bukan hanya transaksi keuangan yang harusnya dipisah antara pribadi dan usaha. Pemisahan juga

seharusnya dilakukan antara harta usaha dan harta pribadi. Hal ini agar pemilik usaha dapat mudah melakukan pengawasan atau kontrol terhadap harta yang sudah diinvestasikan dalam usahanya tersebut. Hal ini untuk menghindari potensi pengakuan harta usaha sebagai harta pribadi, ini sangat riskan bagi pemilik usaha yang tidak memiliki modal atau harta usaha yang besar. Semakin pemilik usaha menganggap harta usaha sebagai harta pribadi maka ada kecenderungan untuk menggunakan diluar kepentingan usaha. Jika harta yang seharusnya digunakan untuk usaha ternyata lebih sering digunakan untuk kepentingan pribadi diluar usaha maka tentu saja hal ini berdampak tidak baik bagi kelangsungan usaha. Dengan adanya pemisahan uang atau harta untuk usaha dan harta pribadi, pemilik usaha bisa dengan mudah mengetahui bagaimana perkembangan uang yang sudah diinvestasikan dalam usaha. Semua pelaku usaha pasti menginginkan perkembangan yang bagus pada usaha yang telah dirintis, namun jika ternyata hasil usaha lebih banya untuk belanja pribadi, kecil kemungkinan usahanya akan berkembang, bahkan sangat mungkin mengalami kebangkrutan.

C. PELUANG DAN STRATEGI PENERAPAN PSAK-ETAP PADA UMKM

Meskipun penerapan PSAK-ETAP dihadapkan pada dua masalah mendasar sebagaimana diuraikan diatas, namun masih ada harapan besar agar UMKM dapat menerapkan PSAK-ETAP dengan segera. Dari penelitian ini mendapatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menganggap penting adanya laporan keuangan yang tertib dan disiplin. Hal ini tentu saja memunculkan harapan bahwa sebenarnya para pelaku UKM masih mempunyai keinginan untuk menerapkan standar catatan keuangan bagi usahanya. Namun hal itu terkendala oleh persepsi yang kurang tepat mengenai catatan keuangan usaha, serta perlakuan yang tidak tepat antara pengeluaran dan harta pribadi dengan pengeluaran dan harta usaha.

Jelas sekali bahwa masalah utama pada penerapan PSAK-ETAP pada UKM adalah masih adanya persepsi yang tidak tepat mengenai catatan keuangan usaha, serta masih terdapatnya percampuran antara keuangan usaha dan keuangan pribadi pada UMKM. Karena diperlukan suatu strategi untuk mengarahkan persepsi para pelaku UKM dalam menyikapi pentingnya laporan keuangan.

Jika dilihat, misalnya pada MixMax Shop, pemilik usaha mengakui bahwa laporan keuangan adalah hal yang penting untuk dilakukan.

> *"...penting sekali sih...terlebih lagi untuk mengetahui harga pokok pembelian barang dan harga jualnya. Laporan yang harus ada dan cukup penting adalah laporan mengenai harga barang dan catatan keluar masuk barang...."* (Syani – Owner MixMax Shop).

Paling tidak pemilik MixMax Shop sudah menyadari pentingnya catatan keuangan meskipun cakupannya hanya sebatas catatan harga pokok penjualan dan stok.

Yang terjadi pada Sahabat Jaya Katering sedikit berbeda dengan MixMax Shop. Pemilik Sahabat Jaya Katering pada dasarnya menyadari bahwa catatan keuangan itu sangat penting, namun hal itu tidak dipahami sebagai alat untuk mengetahui perkembangan kinerja usahanya melainkan sebagai beban tambahan. Karena menurut pemilik, pencatatan keuangan memerlukan tenaga khusus yang hanya mengerjakan laporan keuangan, ketidaktersediaan tenaga inilah yang menjadi alasan mengapa catatan keuangan tidak dilakukan. Senada dengan pemilik CV Resureksi dimana untuk melakukan pencatatan keuangan dibutuhkan tenaga dan waktu khusus, sedangkan pengelola usaha hanya dua orang sehingga belum dapat melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan tertib. Selain itu menurut pemilik Resureksi, usaha yang dijalankan hanya dipertanggungjawabkan untuk diri sendiri, jadi yang penting tidak rugi saja sudah cukup. Pada dasarnya pemilik Sahabat Jaya Katering dan pemilik Resureksi sama-sama menyadari pentingnya catatan keuangan untuk mengetahui berapa yang mereka peroleh dan dibelanjakan dari hasil usaha.

Karena itu persepsi para pelaku UMKM harus diarahkan yaitu bahwa catatan keuangan seharusnya bukan menjadi beban, mengarahkan persepsi ini misalnya dengan menunjukkan secara nyata bagaimana pencatatan keuangan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu perlu dibuatkan suatu model yang sangat memudahkan bagi pelaku UMKM untuk menerapakannya. Suatu model penerapan sistem akuntansi keuangan yang dibuat dengan sederhana namun telah mencakup semua unsur laporan keuangan sesuai dengan PSAK-ETAP.

Untuk menumbuhkan kebiasaan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, harus diberikan contoh format pencatatan transaksi yang secara sederhana,

tidak membutuhkan waktu lama, serta tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal ini karena sumberdaya, terutama SDM yang dimiliki UMKM sangat terbatas. Diupayakan dengan sumberdaya yang ada UMKM tidak merasa terbebani jika harus membuat laporan keuangan. Kesan rumit dalam laporan keuangan harus diminimalisir, sehingga UMKM tidak menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan hanya membebani. Namun meskipun sederhana, Pencatatan transaksi usaha setidaknya harus mencakup transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian (tunai dan kredit), penjualan (tunai dan kredit), piutang, dan utang. Catatan-cataan tersebut penting sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan. Tanpa adanya catatan mengenai transaksi usaha, tidak lah mungkin dapat menyususn laporan keuangan. Agar laporan keuangan memberikan gambaran riil, maka setiap transaksi harus disertai bukti transaksi, sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan bukan hanya perkiraan.

Perlu dibuatkan model pencatatan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh UMKM. Meskipun dibuat sederhana sesuai dengan kebutuhan menurut kebutuhan UMKM, namun laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan dapat dipakai untuk:

1. Memberi informasi yang reliabel dan akuntabel mengenai posisi keuangan UMKM,
2. Sebagai bahan untuk menilai kinerja UMKM,
3. Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan UMKM.

Untuk UMKM laporan keuangan yang perlu disusun hanyalah tiga komponen saja, yaitu Neraca (*Balance Sheet*), Laporan Laba/ Rugi (*Income Statement*), dan Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*).

Dengan menyusun laporan keuangan dan memahami isi dari laporan keuangan, diharapkan akan dapat membantu pengusaha dalam membuat keputusan dalam mengembangkan usaha, baik keputusan investasi maupun keputusan untuk mengajukan kredit usaha. Setelah laporan keuangan selesai disusun, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengevalusai kondisi dan potensi perusahaan yang dalam hal ini adalah usaha kecil dan menengah. Untuk melihat kondisi kinerja keuangan perusahaan digunakan rasio laporan keuangan. Analisis keuangan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kawajiban pada pihak lain dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih.

Jika UMKM telah memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK-ETAP) maka untuk selanjutnya akan memudahkan program-program pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang lain. Selain itu, dengan laporan keuangan yang baik, pelaku UMKM dapat mengakses layanan kredit perbankan yang selama ini sulit mereka jangkau. Hal ini telah terbukti pada apa yang terjadi pada CV Sawoong, dengan manajemen keuangan yang baik serta laporan keuangan yang riil, UKM ini telah berhasil mendapatkan kredit modal dari tiga bank sekaligus. Perbankan dengan mudah menilai apakah CV Sawoong termasuk usaha yang sehat atau tidak dengan melihat laporan keuangannya.

KESIMPULAN

Bisnis dalam skala apapun, laporan keuangan berperan sangat penting, disamping sebagai acuan bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan, juga terutama untuk memperoleh gambaran kondisi kinerja keuangan perusahaan, untung atau rugi. Begitu juga pada skala usaha mikro kecil dan menengah, catatan yang baik dan tertib akan membantu seorang pelaku usaha mengetahui transaksi apa saja yang telah dilakukan usahanya selama periode tertentu. Dengan mengetahui transaksi apa yang telah dilakukan, pelaku usaha dapat memperkirakan berapa uang yang telah dan akan dipakai untuk mengembangkan usahanya kedepan.

Untuk itulah perlu dilakukan standarisasi laporan keuangan bagi UMKM. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang standar dan dapat dipahami, diharapkan nantinya para pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit usaha. Tentu saja laporan keuangan untuk UMKM harus diformulasikan dengan sederhana sehingga dapat dipahami, meski sederhana namun juga harus memenuhi unsur reabilitas, realtime, serta akuntabel.

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kendala-kendala UMKM tidak mempunyai

laporan keuangan sesuai dengan standar SAK-ETAP ialah sebagai berikut:

1. Tidak adanya catatan transaksi yang baik dan tertib;
2. Ketiadaan catatan transaksi tersebut karena sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami bentuk catatan transaksi keuangan itu seperti apa;
3. Karena kekurangpahaman tersebut maka memunculkan persepsi bahwa catatan keuangan suatu hal yang rumit dan sulit diterapkan pada usaha mereka;
4. Adanya persepsi bahwa tanpa laporan keuangan pun, usaha tetap berjalan dan memberi penghasilan.

Dari penelitian juga didapatkan bahwa ternyata UMKM yang mempunyai catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih muda dari beberapa UMKM yang lainnya. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi, bahkan omzet pada tahun 2010 mencapai lebih dari 800 juta rupiah, dengan keutungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah.

SARAN

Perlunya diberikan pemahaman kepada UMKM tentang peran penting laporan keuangan, hal ini dapat dilakukan dengan:

1. Menyusun suatu model penyusunan laporan keuangan pada UMKM, mulai dari proses pencatatan semua transaksi, harta (aktiva), serta kewajiban, dengan bahasa yang sederhana dan dengan contoh yang langsung dapat diterapkan oleh pelaku UMKM.
2. Memberikan motivasi pada para pelaku UMKM dengan menggandeng UMKM yang telah maju dan mempunyai catatan dan laporan keuangan yang baik, bagaimana laporan keuangan yang baik begitu berpengaruh pada perkembangan usaha dan akses pada lembaga keuangan yang menyediakan modal.
3. Pada penelitian berikutnya perlu digali Pengaruh kemampuan akses pada lembaga perbankan terhadap perkembangan bisnis UMKM. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang ilmiah dan meyakinkan peran penting lembaga perbankan, karena selama ini pelaku UMKM disamping masih kesulitan mengakses lembaga perbankan, juga ada persepsi yang menyebabkan mereka ketakutan untuk menggunakan kredit perbankan

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, 2007. "*Mewujudkan Equilibrium Sektor Finansial dan Sektor Riil Syari'ah dalam Mengembangkan Ekonomi Islam",*

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1165:mewujudkan-equilibrium-sektor-finansial&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60

Barki, Henri and Jon Hartwick. 1994. Measuring User Participation, User Involvement, and User Attitude. *MIS Quarterly*. January.

DB, 2007. ***"Peran Serta UMKM dalam Perekonomian"***, Media Akuntansi Plus: Referensi Kalangan Profesional, Edisi 58/Tahun XIII/April 2007, Jakarta:Ikatan Akuntan Indonesia.

IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. *Seminar Nasional Akuntans, Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia: "Peluncuran Standar Akuntansi Syari'ah dalam 3 Bahasa dan Standar Akuntansi ETAP",* 17-18 Juli, 2009. Malang: Widyaloka Convention Hall, Universitas Brawijaya.

Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisnoni. "Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan." *Jurnal Bisnis dan Usahawan,* II No. 8 (2004): 210 – 218.

Jatmiko, RD, 2004. ***Pengantar Bisnis,*** Malang: Penerbit UMM Press.

Kellen, Pius Bumi. ”Peranan Akuntansi Untuk Pengembangan Bisnis Kecil.” *Jurnal Bisnis dan Usahawan,* II No.7 (2004): 181 – 184.

Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., dan Terry DW., “*Akuntansi Intermediate Edisi Kesepuluh*, terj. Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.

McLeod, Jr. Raymond. 2001. *Management Information Systems*. 8th Edition. Prentice-Hall, Inc.

_____and george Schell. 2001. *Management Information Systems.* 8th Edition. Prentice-Hall, Inc.

Media Akuntansi, 2006. *“Mengutip Setahun Berdirinya Komite Akuntansi Syariah (KAS)”,* Fokus. Media Akuntansi, Edisi 57/TahunXII/Oktober 2006, hal. 5.

Muhammad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah, Edisi 2*. Jakarta: Salemba empat.

Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen : Konsep dan Rekayasa*. Edisi 2.Cetakan 2. STIE YKPN. Yogyakarta.

Steven, John M., A.G. Cahill, E.S. Overman, and Lee Frost-Kumpf. 1994. Computerized Information Systems and Public Sector Productivity. *International Journal of Public Administration*. 17(1). 1-31.

Suryaningrum, Diah Hhari. 2003. The Relationsship between User Participation and System Succes : Study of three contingency factors on BUMN in Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi VI* di Surabaya, 16-17 Oktober.

Tohar, M., 2000. ***Membuka Usaha Kecil,*** Cetakan ke 5, Yogyakarta: Kanisius.

Wijono, Wiloejo W. *“Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan.” Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus* (2005): 86 – 100.

Wilkinson, J.W., Michael J. Cerullo, Vasant Raval, Bernard Wong-on-Wing. 1997. *Accounting Information Systems*. 4th Edition. John Wiley and Sons, Inc., New York.

http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_19.pdf